

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH: ANALISIS KESENJANGAN PEMAHAMAN MASYARAKAT

Suratman

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

suratman@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received 10-12-2025

Revised :18-05-2026

Accepted :01-06-2026

Keywords:

Village Institutions,
Public

Communication,

Village Cooperatives,
Community

Participation,

This research analyzes the effectiveness of village government public communication in implementing the Merah Putih Village Cooperative Program, focusing on the gap in understanding among the community in Bioa Sengok Village, Lebong Regency, Bengkulu. Launched through Presidential Instruction No. 9 of 2025, the program aims to establish 80,000 village cooperatives to strengthen the people's economy. Using a mixed-method approach with the Expectancy Gap and Policy Communication theoretical frameworks, the study involved 100 respondents and 8 key informants. The findings identified five types of gaps: Knowledge Gap, manifested in fundamental differences between the government's administrative perspective and the community's substantive understanding; Standards Gap in unclear technical regulations; Delivery Gap due to limited human resource capacity; Communications Gap from weak cross-sector coordination; and Service Gap in expectations versus implementation capabilities. Causal factors include regulatory ambiguity, capacity constraints, weak coordination, unstable local political conditions, and negative historical experiences. The impacts include a wait-and-see attitude among the community, compliance-driven participation, audit concerns, and potential conflicts with BUMDes. Strategic recommendations include strengthening regulations, two-way participatory communication, university assistance, synchronization with BUMDes, and learning from local cooperative best practices.

Pendahuluan

Transformasi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mengalami perubahan paradigmatis sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pergeseran ini menandai era baru dimana desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan transformasi menjadi subjek yang memiliki otonomi

dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi (Antlöv et al., 2016). Dalam konteks ini, komunikasi publik menjadi instrumen krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa, terutama dalam program yang kompleks dan memerlukan partisipasi aktif masyarakat seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kelembagaan ekonomi yang modern, adaptif, dan berdaya saing. Program ini dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip gotong royong dengan manajemen koperasi modern, sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan (Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih., 2025). Namun, kompleksitas program yang melibatkan 13 kementerian/lembaga dan memerlukan koordinasi multisektor menimbulkan tantangan signifikan dalam komunikasi kebijakan, terutama dalam mentransfer pemahaman program dari level nasional hingga implementasi di tingkat desa.

Literatur komunikasi kebijakan publik menekankan bahwa kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat penerima manfaat merupakan fenomena yang sering terjadi dalam implementasi program pemerintah, terutama di negara berkembang dengan tingkat literasi dan akses informasi yang beragam (Bertot et al., 2010). (Hidayati et al., 2025) dalam penelitiannya tentang program ekonomi desa menemukan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam perspektif antara pemerintah desa yang cenderung memandang program dari sudut administratif-compliance dan masyarakat yang lebih menekankan aspek praktis serta manfaat langsung. Kesenjangan persepsi ini berpotensi menimbulkan resistensi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang diselenggarakan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik dalam implementasi kebijakan desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Dalam penelitian (Sumarsono et al., 2022) mengidentifikasi bahwa kapasitas komunikasi aparatur desa, tingkat literasi masyarakat, dan karakteristik sosial-budaya lokal menjadi variabel determinan dalam keberhasilan sosialisasi program pemerintah. Lebih lanjut (Hasan, 2022) menekankan pentingnya mempertimbangkan pengalaman historis masyarakat dengan program pemerintah sebelumnya, yang secara signifikan membentuk ekspektasi dan sikap terhadap program baru. Dalam konteks Indonesia, dimana terdapat keberagaman yang tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya antar daerah, pendekatan komunikasi yang uniform seringkali tidak efektif dan perlu disesuaikan dengan konteks lokal spesifik.

Teori Expectancy Gap yang dikembangkan oleh (Zeithaml et al., 1996) dalam konteks manajemen layanan kemudian diadaptasi dalam studi kebijakan publik, menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kesenjangan antara ekspektasi stakeholder dan realitas implementasi program. Teori ini mengidentifikasi lima dimensi kesenjangan Knowledge Gap (kesenjangan pengetahuan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen),

Standards Gap (kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan), Delivery Gap (kesenjangan antara spesifikasi layanan dan penyampaian aktual), Communications Gap (kesenjangan antara penyampaian layanan dan komunikasi eksternal), dan Service Gap (kesenjangan keseluruhan antara layanan yang diharapkan dan diterima). Aplikasi kerangka ini dalam konteks komunikasi kebijakan desa memungkinkan identifikasi sistematis terhadap titik-titik kritis yang menyebabkan kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam lanskap komunikasi pemerintahan kontemporer, (Dunleavy et al., 2006) mengembangkan framework NATO (Nodality, Authority, Treasure, Organization) yang menganalisis instrumen komunikasi pemerintah. Framework ini relevan untuk memahami bagaimana pemerintah desa memanfaatkan posisi sentral mereka dalam jaringan informasi (nodality), otoritas legal (authority), sumber daya finansial (treasure), dan kapasitas organisasional (organization) dalam mengkomunikasikan program kepada masyarakat. Penelitian (Hood & Margetts, 2007; Sawyer, 2017) menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi pemerintah tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan berbagai instrumen secara strategis dan adaptif terhadap konteks lokal.

Studi tentang komunikasi program pemberdayaan desa di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang spesifik. Dalam penelitian (Nazaruddin et al., 2023) menemukan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan masyarakat, keterbatasan kapasitas komunikasi formal seringkali menjadi hambatan dalam penyampaian informasi program yang kompleks. Lebih lanjut, (Kushandajani, 2019) mengidentifikasi bahwa struktur komunikasi di desa yang masih didominasi oleh pola patron-client dan jejaring informal memerlukan strategi komunikasi yang berbeda dari pendekatan formal-birokratis. Fenomena ini menimbulkan paradoks dimana kedekatan sosial pemerintah desa dengan masyarakat tidak otomatis menjamin efektivitas komunikasi program, terutama untuk program yang memerlukan pemahaman teknis dan legal yang kompleks.

Penelitian spesifik tentang koperasi desa dan kelembagaan ekonomi lokal juga memberikan wawasan penting. Dalam kajian (Kushandajani, 2019) tentang pengembangan koperasi di pedesaan Jawa mengidentifikasi bahwa kesuksesan koperasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi, yang dibentuk melalui proses komunikasi dan edukasi yang intensif dan berkelanjutan. Sementara itu, (Febriantini et al., 2020) menekankan pentingnya sinergi antara koperasi desa dengan institusi ekonomi desa existing seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menghindari duplikasi dan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya perlu menjelaskan substansi program, tetapi juga mengklarifikasi posisi dan relasinya dengan institusi ekonomi desa yang sudah ada.

Dimensi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa juga menjadi fokus penting dalam literatur, yang dibedakan menjadi partisipasi sebagai means (instrumen untuk mencapai efisiensi program) dan partisipasi sebagai ends (tujuan pemberdayaan itu sendiri), dimana komunikasi yang efektif menjadi prasyarat untuk mencapai partisipasi yang genuine (Cornwall, 2008). Dalam

konteks Indonesia, (Udhiya et al., 2024) menemukan bahwa program-program pemberdayaan desa seringkali mengalami fenomena pseudo-participation dimana masyarakat hadir secara fisik dalam kegiatan program namun tidak memiliki pemahaman substansif tentang tujuan dan mekanisme program, akibat komunikasi yang bersifat top-down dan instruktif. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya komunikasi dialogis dan partisipatif dalam implementasi program desa.

Kajian tentang kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola program juga relevan untuk dipahami. Mayoritas desa di Indonesia menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur dalam aspek manajerial, keuangan, dan komunikasi publik, yang menjadi kendala struktural dalam implementasi program pemerintah yang semakin kompleks (Polidu et al., 2025). Lebih spesifik, (Lestariyono, 2022) menemukan bahwa ketidakstabilan kepemimpinan desa, terutama dalam periode transisi atau ketika dipimpin oleh pejabat sementara, berdampak signifikan pada kontinuitas dan efektivitas komunikasi program. Kondisi ini sangat relevan dengan konteks implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan di tengah periode dimana banyak desa mengalami transisi kepemimpinan pasca pemilihan kepala desa serentak.

Penelitian tentang trust (kepercayaan) sebagai modal sosial dalam implementasi program desa juga memberikan perspektif penting. Hal ini menurut (Putnam, 2000) bahwa kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dimana komunikasi yang transparan dan konsisten menjadi faktor kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, (Alfiansyah, 2023) menemukan bahwa pengalaman historis masyarakat dengan program pemerintah yang tidak berkelanjutan atau gagal mencapai target yang dijanjikan telah mengikis kepercayaan masyarakat desa terhadap program-program baru, menciptakan sikap skeptis dan wait-and-see. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi program tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan memerlukan upaya ekstra untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.

Literatur tentang digital divide dan akses informasi di pedesaan juga relevan dalam memahami tantangan komunikasi program. Menurut (Nasution, 2016) mengidentifikasi bahwa meskipun penetrasi teknologi informasi telah meningkat di pedesaan Indonesia, terdapat disparitas signifikan dalam kemampuan mengakses dan memahami informasi digital, yang mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi program yang semakin bergantung pada media digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi komunikasi yang tepat untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat desa dengan karakteristik yang beragam dalam hal literasi digital dan akses teknologi.

Studi tentang best practices komunikasi program pemberdayaan desa dari berbagai negara berkembang juga memberikan pembelajaran berharga. Evaluasi program (CDD) di berbagai negara menemukan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan secara signifikan meningkatkan pemahaman, ownership, dan keberlanjutan program (Nasution, 2016; Polidu et al., 2025; Siahaan, 2024). Sementara itu, (Mansuri & Rao, 2013) dalam meta-analisis program CDD menekankan pentingnya contextualization dan adaptasi strategi komunikasi terhadap kondisi lokal spesifik, karena pendekatan blueprint yang uniform seringkali gagal mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya lokal yang heterogen.

Fenomena kesenjangan persepsi dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, mencerminkan kompleksitas yang telah diidentifikasi dalam literatur. Observasi awal menunjukkan perbedaan pemahaman yang signifikan antara perangkat desa dan masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat program. Pemerintah desa cenderung memandang program dari perspektif administratif untuk memenuhi target pembangunan desa, sementara masyarakat memiliki ekspektasi beragam terkait manfaat langsung yang dapat diperoleh. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas komunikasi pemerintah desa, kondisi kepemimpinan yang tidak stabil karena mayoritas desa dipimpin pejabat sementara, serta pengalaman historis masyarakat dengan program-program pemerintah sebelumnya yang tidak selalu berhasil memenuhi ekspektasi.

Berdasarkan kompleksitas yang teridentifikasi dalam literatur dan kondisi empiris di lapangan, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana komunikasi publik pemerintah desa dapat ditingkatkan efektivitasnya dalam konteks implementasi program yang kompleks seperti Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana bentuk-bentuk kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih?, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan pemahaman tersebut?, (3) Bagaimana dampak kesenjangan pemahaman terhadap penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam program?, dan (4) Strategi komunikasi publik seperti apa yang dapat dikembangkan untuk meminimalisir kesenjangan pemahaman dan meningkatkan efektivitas implementasi program? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model komunikasi kebijakan desa yang kontekstual, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merancang strategi komunikasi program pemberdayaan desa yang lebih efektif.

Inti permasalahan yang diangkat penelitian ini adalah belum tersedianya bukti empiris yang sistematis dan terukur mengenai sejauh mana komunikasi publik pemerintah desa mampu menutup kesenjangan pemahaman masyarakat pada tahap awal implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Studi terdahulu (Hidayati et al., 2025; Sumarsono et al., 2022; Udhiya et al., 2024) telah mengidentifikasi adanya disparitas persepsi antara aparatur dan masyarakat, namun sebagian besar bersifat deskriptif, memperlakukan “kesenjangan pemahaman” sebagai konsep tunggal, dan belum mengaitkannya secara langsung dengan kesediaan berpartisipasi. Dengan demikian, kesenjangan penelitian (research gap) yang diisi studi ini mencakup tiga hal: pertama, ketiadaan pengukuran multidimensional terhadap kesenjangan pemahaman; kedua, minimnya pengujian hubungan antara dimensi kesenjangan dan outcome partisipasi; dan ketiga, belum adanya analisis komunikasi publik desa yang secara eksplisit mengklasifikasikan saluran, pesan, frekuensi, dan aktor pada konteks program lintas-sektor yang relatif baru seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan dan mengukur bentuk-bentuk kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan lima dimensi Expectancy Gap; (2) mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menyebabkan kesenjangan

tersebut; (3) menganalisis dampak kesenjangan terhadap penerimaan dan partisipasi masyarakat; serta (4) merumuskan strategi komunikasi publik yang kontekstual untuk meminimalkan kesenjangan dan meningkatkan efektivitas implementasi program.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam empat pertanyaan penelitian yang dirumuskan agar dapat dijawab secara terukur dan tertaut dengan teknik analisis yang digunakan: (RQ1) Seberapa besar perbedaan skor persepsi (mean skala Likert) antara kelompok perangkat desa/tokoh masyarakat dan masyarakat umum pada masing-masing dari lima dimensi Expectancy Gap, dan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik? (RQ2) Faktor-faktor apa pada tingkat regulasi, kapasitas SDM, sosial-budaya, dan kontekstual lokal yang menjelaskan terjadinya kesenjangan, dan bagaimana kontribusi relatifnya? (RQ3) Dimensi kesenjangan mana yang paling kuat memprediksi kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program? (RQ4) Strategi komunikasi publik seperti apa ditinjau dari saluran, pesan, frekuensi, dan aktor yang paling sesuai untuk konteks Desa Bioa Sengok?

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dua kontribusi. Pertama, mengadaptasi teori Expectancy Gap yang semula dikembangkan untuk manajemen kualitas layanan (Parasuraman et al., 1988, 1991) ke ranah komunikasi kebijakan publik di tingkat desa, sekaligus menguji keberlakuannya pada konteks negara berkembang. Kedua, mengintegrasikan kerangka NATO (Hood & Margetts, 2007) sebagai lensa untuk menjelaskan bagaimana keterbatasan instrumen komunikasi pemerintah desa menghasilkan kesenjangan, serta memperkenalkan konsep cascading gaps (kesenjangan berantai) yang menautkan kelima dimensi sebagai satu sistem yang saling memperkuat. Secara praktis, penelitian ini menyediakan basis bukti (evidence base) bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memprioritaskan intervensi komunikasi khususnya pada dimensi Communications Gap dan Service Gap yang teridentifikasi sebagai prediktor terkuat partisipasi serta memberikan dasar bagi harmonisasi kelembagaan antara koperasi desa dan BUMDes di tingkat lokal.

Penelitian ini memposisikan komunikasi publik pemerintah desa sebagai variabel proses yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kesediaan berpartisipasi. Agar dapat diukur, konstruk “pemahaman masyarakat” dioperasionalkan secara multidimensi mengikuti taksonomi pengetahuan–sikap–perilaku (knowledge–attitude–behavior/KAB) yang lazim digunakan dalam studi komunikasi pembangunan, lalu dipetakan ke dalam lima dimensi Expectancy Gap sebagaimana diukur oleh instrumen survei (lihat Tabel 1). Dimensi kognitif tecermin pada Knowledge Gap dan Standards Gap; dimensi afektif (sikap/kepercayaan) pada Delivery Gap; sedangkan dimensi konatif (niat dan perilaku partisipatif) tecermin pada Communications Gap, Service Gap, dan variabel outcome kesediaan berpartisipasi.

Tabel 1. Operasionalisasi Konstruk Pemahaman Masyarakat dan Pemetaannya ke Dimensi Expectancy Gap

Dimensi pemahaman (KAB)	Definisi operasional	Dimensi Expectancy Gap terkait	Sumber/instrumen data
Kognitif (pengetahuan)	Tingkat pengetahuan akurat tentang tujuan, mekanisme,	Knowledge Gap; Standards Gap	Survei (item skala Likert 5 poin);

	dan aturan teknis program		wawancara; analisis dokumen
Afektif (sikap/kepercayaan)	Sikap dan derajat kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah desa serta manfaat program	Delivery Gap	Survei (item kepercayaan kapasitas); wawancara mendalam; FGD
Konatif (niat/perilaku)	Niat dan kesediaan untuk berpartisipasi aktif (bukan sekadar hadir) dalam program	Communications Gap; Service Gap; kesediaan berpartisipasi	Survei (kesediaan berpartisipasi); wawancara; FGD

Berdasarkan kerangka tersebut, dirumuskan tiga proposisi yang konsisten dengan teknik analisis kuantitatif yang digunakan dan diuji lebih lanjut melalui data kualitatif: **Proposisi 1.** Kesenjangan pada dimensi kognitif (Knowledge Gap dan Standards Gap) yang lebih besar berasosiasi dengan Communications Gap yang lebih besar, sehingga membentuk pola kesenjangan berantai (cascading gaps). **Proposisi 2.** Communications Gap dan Service Gap merupakan prediktor terkuat terhadap rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, melampaui dimensi kesenjangan lainnya. **Proposisi 3.** Pengalaman historis negatif terhadap program terdahulu dan kondisi kepemimpinan desa yang transisional memperkuat sikap wait-and-see, sehingga memediasi hubungan antara kesenjangan pemahaman dan rendahnya partisipasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan desain explanatory sequential (Creswell & Poth, 2018), yaitu diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif secara lebih mendalam. Penelitian dilaksanakan di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama Mei–Agustus 2025. Lokasi dipilih secara purposive karena merupakan desa sasaran awal Program Koperasi Desa Merah Putih, memiliki karakteristik yang representatif, serta telah berpengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa.

Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan stratified random sampling, terdiri atas perangkat desa/tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert lima poin yang dikembangkan berdasarkan kerangka Expectancy Gap, meliputi lima dimensi kesenjangan: *knowledge gap*, *standards gap*, *delivery gap*, *communications gap*, dan *service gap*. Instrumen telah melalui uji validitas oleh ahli dan uji reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,87, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik.

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci yang dipilih secara purposive, focus group discussion (FGD) dengan sepuluh peserta, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan maupun dokumen desa. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial (uji *t*, ANOVA, korelasi, dan regresi) dengan bantuan SPSS 26, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan thematic analysis (Braun & Clarke, 2023) melalui proses pengkodean, identifikasi tema, dan

interpretasi temuan.

Integrasi data dilakukan dengan strategi connection, yaitu menggunakan hasil analisis kuantitatif sebagai dasar pendalaman data kualitatif, kemudian menggabungkan kedua temuan melalui triangulasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Fetters & Molina-Azorin, 2017). Penelitian dilaksanakan sesuai prinsip etika penelitian melalui *informed consent*, jaminan kerahasiaan identitas responden, serta telah memperoleh persetujuan etik sebelum pelaksanaan penelitian.

Pembahasan

Analisis terhadap 100 responden survei dan 8 informan kunci mengungkapkan kompleksitas kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bioa Sengok. Temuan penelitian mengidentifikasi lima bentuk kesenjangan yang terstruktur dalam kerangka Expectancy Gap, dengan setiap dimensi kesenjangan memiliki karakteristik dan implikasi spesifik terhadap efektivitas komunikasi publik pemerintah desa. Knowledge Gap termanifestasi sebagai disparitas pemahaman fundamental dimana perangkat desa memahami program dari perspektif administratif-compliance sebagai mandate dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi target pembangunan desa, sementara masyarakat umum menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang substansi program. Dari 70 responden masyarakat umum, hanya 12% yang menyatakan memahami dengan jelas tujuan Program Koperasi Desa Merah Putih, sementara 65% menyatakan tidak pernah mendengar tentang program tersebut sebelum survei dilakukan. Sebaliknya, 83% dari 30 responden perangkat desa dan tokoh masyarakat menyatakan telah mengetahui program melalui rapat koordinasi di tingkat kecamatan atau kabupaten, meskipun pemahaman mereka juga cenderung terbatas pada aspek regulatif dan target administratif tanpa pemahaman mendalam tentang substansi dan filosofi pengembangan koperasi desa.

Wawancara mendalam dengan Kepala Desa mengungkapkan bahwa pemahaman pemerintah desa tentang program terutama bersumber dari sosialisasi singkat di tingkat kabupaten yang fokus pada target pembentukan koperasi dan timeline implementasi, tanpa diskusi substantif tentang bagaimana mengkomunikasikan program secara efektif kepada masyarakat atau bagaimana membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola koperasi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan perangkat desa “Kami diberi tahu bahwa setiap desa harus membentuk koperasi desa dalam waktu enam bulan, tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana caranya, apa bedanya dengan BUMDes yang sudah ada, atau bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat agar mereka mau bergabung.” Kesenjangan pemahaman ini mengindikasikan failure pada tahap pertama komunikasi kebijakan dimana informasi program tidak ditransmisikan secara memadai dari level pembuat kebijakan ke implementer di tingkat desa, yang kemudian berdampak cascade pada ketidakmampuan pemerintah desa untuk mengkomunikasikan program kepada masyarakat. Temuan ini konsisten dengan studi (Nursetiawan et al., 2022) tentang kesenjangan pemahaman dalam program ekonomi desa, dimana terdapat disconnect antara perspektif administratif pemerintah dan perspektif praktis masyarakat.

Standards Gap teridentifikasi dalam ketidakjelasan regulasi teknis dan ketidaktersediaan instrumen implementasi yang memadai. Data survei menunjukkan bahwa hanya 23% responden perangkat desa menyatakan bahwa aturan dan mekanisme program telah disosialisasikan dengan baik, sementara 68% menyatakan masih bingung dengan petunjuk teknis yang diberikan. Ketua BUMDes dalam wawancara mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidakjelasan relasi antara koperasi desa dengan BUMDes yang sudah existing: 'Kami sudah punya BUMDes yang berjalan dengan beberapa unit usaha, sekarang diminta bentuk koperasi desa lagi.

Data survei menunjukkan bahwa hanya 35% responden menyatakan percaya bahwa pemerintah desa memiliki kapasitas untuk menjalankan program dengan baik, sementara 52% menyatakan ragu atau tidak percaya. Keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dalam hal pengetahuan tentang koperasi dan manajemen kelembagaan ekonomi juga teridentifikasi sebagai constraint signifikan. Dari 30 responden perangkat desa, hanya 20% yang pernah mendapat pelatihan tentang koperasi atau kelembagaan ekonomi, dan mayoritas mengakui tidak memiliki keahlian teknis untuk mendampingi pembentukan dan pengembangan koperasi desa. Seorang informan tokoh masyarakat mengungkapkan kekhawatiran Kalau program ini jalan, siapa yang akan mengelola? Perangkat desa sudah sibuk dengan urusan administrasi sehari-hari, masyarakat belum tentu mau atau mampu. Kita tidak punya SDM yang cukup untuk menjalankan ini dengan serius. Kesenjangan kapasitas ini menciptakan ekspektasi yang rendah tentang kemampuan desa untuk merealisasikan program sesuai dengan standar yang diharapkan.

Communications Gap merupakan dimensi kesenjangan yang paling kritis karena langsung berkaitan dengan efektivitas komunikasi publik pemerintah desa. Analisis mengidentifikasi multiple layers of communication gap dari level nasional hingga masyarakat desa. Pada level koordinasi antar kementerian/lembaga, keterlibatan 13 kementerian dalam program menciptakan kompleksitas koordinasi yang belum terselesaikan dengan baik, menghasilkan fragmentasi informasi dan inkonsistensi instruksi yang diterima di tingkat daerah. Pada level komunikasi pemerintah daerah ke desa, sosialisasi program yang dilakukan sangat terbatas dengan format rapat formal yang hanya melibatkan kepala desa atau perwakilan perangkat desa, tanpa mekanisme yang sistematis untuk memastikan bahwa informasi tersebut ditransmisikan lebih lanjut ke masyarakat. Pada level komunikasi pemerintah desa ke masyarakat, yang merupakan fokus utama penelitian ini, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan. Data survei menunjukkan bahwa 72% responden masyarakat menyatakan tidak pernah menerima informasi tentang program dari pemerintah desa, dan 81% menyatakan tidak pernah diundang dalam forum sosialisasi program. Bahkan untuk responden yang pernah mendengar tentang program, hanya 18% yang merasa informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Saluran komunikasi yang digunakan juga sangat terbatas, terutama melalui pengumuman di papan pengumuman desa yang tidak efektif menjangkau masyarakat yang kesibukan sehari-harinya tidak memungkinkan untuk secara reguler mengakses papan pengumuman tersebut.

Karakteristik komunikasi yang top-down dan instruktif juga teridentifikasi sebagai masalah dalam Communications Gap. Ketika sosialisasi program dilakukan, formatnya cenderung bersifat one-way communication dimana

perangkat desa menyampaikan informasi program dan target yang harus dicapai, tanpa membuka ruang dialog yang memadai untuk mendengarkan kekhawatiran, pertanyaan, atau masukan dari masyarakat. Seorang informan masyarakat mengungkapkan Kalau ada sosialisasi program dari pemerintah, biasanya kami hanya disuruh mendengarkan dan diminta untuk dukung. Jarang ada kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat kami tentang bagaimana program ini seharusnya dijalankan. Keterbatasan penggunaan media komunikasi modern juga menjadi faktor pembatas jangkauan komunikasi. Meskipun penetrasi smartphone dan media sosial telah cukup tinggi di desa, pemerintah desa belum memanfaatkan secara optimal media digital untuk komunikasi program, dengan hanya mengandalkan grup WhatsApp internal perangkat desa tanpa strategi systematic untuk menjangkau masyarakat luas melalui platform digital. Ketika ditanya tentang preferensi saluran komunikasi, 68% responden masyarakat menyatakan bahwa mereka lebih suka mendapat informasi melalui pertemuan RT/RW atau forum informal di komunitas, yang menunjukkan pentingnya memanfaatkan struktur komunikasi informal yang ada di desa untuk efektivitas penyampaian informasi program.

Service Gap tercermin dalam kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap manfaat program dan kemampuan aktual program untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Analisis terhadap ekspektasi masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas (76%) berharap program akan memberikan manfaat ekonomi langsung dalam bentuk akses permodalan dengan bunga rendah, peningkatan pendapatan, atau kesempatan usaha baru. Namun, pemahaman yang terbatas tentang mekanisme koperasi dan kapasitas implementasi yang terbatas menciptakan skeptisisme tentang kemampuan program untuk merealisasikan harapan tersebut. Hanya 28% responden menyatakan yakin bahwa manfaat program akan sesuai dengan kebutuhan ekonomi mereka. Lebih kritis lagi adalah ekspektasi yang tidak realistis dari sebagian masyarakat yang memahami program koperasi desa sebagai program bantuan atau subsidi dari pemerintah yang akan memberikan benefit tanpa kontribusi atau partisipasi aktif dari masyarakat. Seorang informan masyarakat mengungkapkan Kalau koperasi desa ini seperti BLT atau bantuan lainnya yang tinggal terima, ya bagus. Tapi kalau harus keluar modal atau aktif ikut mengelola, rasanya berat karena kami sudah sibuk dengan pekerjaan sendiri. Misalignment antara ekspektasi passive beneficiary dengan realitas bahwa koperasi memerlukan partisipasi aktif dan kontribusi anggota menciptakan potensi disappointment dan erosi trust terhadap program jika tidak dikelola dengan komunikasi yang efektif.

Pengalaman negatif ini menciptakan sikap skeptis dan wait-and-see dimana masyarakat memilih untuk tidak terlalu antusias atau berharap tinggi terhadap program baru karena khawatir akan mengalami disappointment lagi. Sebagaimana diungkapkan dalam FGD: “Kami sudah sering dengar program bagus-bagus dari pemerintah, tapi di lapangan tidak jalan seperti yang dijanjikan. Jadi sekarang kami tunggu dulu, kalau programnya benar-benar jalan dan ada manfaatnya, baru kami ikut.” Sikap ini, meskipun dapat dipahami sebagai bentuk proteksi terhadap disappointment, menimbulkan tantangan bagi implementasi program baru karena menciptakan resistensi awal dan memerlukan effort ekstra untuk membangun kembali trust dan antusiasme masyarakat.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan persepsi

mengidentifikasi multiple layers of causation yang saling berinteraksi. Faktor regulasi dan kebijakan mencakup ketidakjelasan substansi regulasi teknis program yang membuat pemerintah desa kesulitan dalam memahami dan mengkomunikasikan program dengan confidence, serta koordinasi yang lemah antar 13 kementerian/lembaga yang terlibat menghasilkan fragmentasi informasi dan inkonsistensi instruksi. Keterlambatan dalam penyiapan infrastruktur implementasi seperti kode rekening Siskeudes juga menciptakan hambatan prosedural yang menghambat inisiatif pemerintah desa. Faktor kapasitas SDM meliputi keterbatasan pengetahuan dan keahlian aparatur desa tentang koperasi dan kelembagaan ekonomi, keterbatasan keterampilan komunikasi publik dalam menyampaikan informasi program yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami masyarakat dengan berbagai tingkat literasi, serta beban kerja aparatur desa yang sudah tinggi dengan berbagai urusan administratif membuat implementasi program baru yang memerlukan effort intensif menjadi challengin. Kondisi kepemimpinan transisional dengan mayoritas desa dipimpin penjabat juga membatasi otoritas dan kontinuitas dalam implementasi program jangka panjang.

Faktor sosial-budaya yang teridentifikasi mencakup heterogenitas tingkat pendidikan dan literasi masyarakat yang memerlukan strategi komunikasi yang differentiated namun sering diabaikan dalam pendekatan komunikasi uniform. Dominasi struktur komunikasi informal di desa yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dalam sosialisasi program juga menjadi missed opportunity. Tradisi partisipasi yang lebih bersifat mobilisasi daripada genuine participation menciptakan sikap pasif menunggu instruksi daripada proaktif mencari informasi atau terlibat dalam perencanaan program. Pengalaman historis dengan program pemerintah yang tidak berkelanjutan atau gagal memenuhi janji menciptakan skeptisisme dan trust deficit yang memerlukan effort ekstra untuk di-overcome. Faktor kontekstual lokal meliputi keberadaan BUMDes sebagai institusi ekonomi desa existing yang menciptakan pertanyaan tentang differensiasi peran dan potensi konflik atau sinergi dengan koperasi desa. Keterbatasan akses terhadap contoh atau model koperasi desa yang sukses di wilayah sekitar membuat masyarakat kesulitan memvisualisasikan bagaimana koperasi desa akan berfungsi dan memberikan manfaat. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas subsisten dengan margin ekonomi yang terbatas membuat partisipasi yang memerlukan kontribusi finansial atau waktu menjadi challenging, serta timing implementasi program yang bersamaan dengan periode sibuk pertanian membuat engagement masyarakat menjadi terbatas.

Dampak kesenjangan persepsi terhadap penerimaan dan partisipasi masyarakat termanifestasi dalam beberapa dimensi. Sikap wait-and-see menjadi dominan dimana 64% responden menyatakan akan menunggu terlebih dahulu untuk melihat bagaimana program berjalan sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. Sikap ini menciptakan chicken-and-egg problem dimana program memerlukan partisipasi awal untuk dapat berjalan dan menunjukkan manfaat, namun masyarakat tidak mau berpartisipasi sebelum melihat bukti manfaat program. Partisipasi compliance-driven rather than conviction-driven juga teridentifikasi dimana masyarakat yang bersedia berpartisipasi terutama dimotivasi oleh tekanan sosial atau kewajiban terhadap pemerintah desa daripada pemahaman dan keyakinan terhadap manfaat program. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan: “Kalau diminta Pak Kepala Desa untuk ikut, ya kita ikut saja. Bukan

karena kita paham atau yakin programnya bagus, tapi tidak enak kalau menolak.” Partisipasi compliance-driven ini problematis karena tidak sustainable dan tidak menghasilkan commitment yang diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang koperasi yang memerlukan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari anggota.

Analisis komparatif antara persepsi perangkat desa dan masyarakat umum menggunakan independent samples t-test menghasilkan temuan yang signifikan. Terdapat perbedaan yang statistik signifikan ($p < 0.001$) dalam seluruh dimensi Expectancy Gap, dengan perangkat desa secara konsisten memiliki mean score yang lebih tinggi dalam pemahaman program, kepercayaan terhadap kapasitas implementasi, dan ekspektasi terhadap manfaat program dibandingkan dengan masyarakat umum. Perbedaan terbesar teridentifikasi dalam dimensi Knowledge Gap (Cohen's $d = 2.34$) dan Communications Gap (Cohen's $d = 2.12$), mengindikasikan bahwa kesenjangan pemahaman dan akses informasi antara kedua kelompok sangat substansial. Analisis one-way ANOVA berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SMA ke atas memiliki pemahaman program yang secara signifikan lebih baik ($F(3,96) = 8.47$, $p < 0.001$) dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SD atau tidak sekolah, yang menekankan pentingnya strategi komunikasi yang differentiated berdasarkan tingkat literasi target audience. Multiple regression analysis mengidentifikasi bahwa Communications Gap ($\beta = -0.48$, $p < 0.001$) dan Service Gap ($\beta = -0.31$, $p < 0.01$) merupakan predictor paling signifikan terhadap kesediaan berpartisipasi dalam program, mengindikasikan bahwa perbaikan dalam komunikasi program dan alignment antara ekspektasi dengan kapasitas delivery merupakan prioritas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. Matriks Hasil Penelitian: Dimensi Kesenjangan Persepsi dan Dampaknya

Dimensi Kesenjangan	Indikator	Temuan Utama	Dampak
Knowledge Gap	Pemahaman substantif program	65% masyarakat tidak mengetahui program; pemerintah desa memahami dari perspektif administratif-compliance tanpa substansi	Rendahnya awareness dan interest masyarakat; komunikasi tidak efektif karena keterbatasan pemahaman pemerintah desa
Standards Gap	Kejelasan regulasi dan mekanisme	68% perangkat desa menyatakan bingung dengan petunjuk teknis; tidak ada kode rekening Siskeudes; ketidakjelasan relasi dengan BUMDes	Ketidakpastian implementasi; kekhawatiran masalah audit; potensi konflik dengan BUMDes
Delivery Gap	Kapasitas implementasi	Hanya 35% responden percaya kapasitas pemerintah desa; mayoritas desa dipimpin pejabat;	Ekspektasi rendah terhadap keberhasilan program; sikap wait-and-see masyarakat

Dimensi Kesenjangan	Indikator	Temuan Utama	Dampak
		keterbatasan SDM dengan keahlian koperasi	
Communications Gap	Efektivitas komunikasi program	72% masyarakat tidak pernah menerima informasi; komunikasi top-down dan instruktif; saluran komunikasi terbatas; koordinasi lintas sektor lemah	Massive information gap; resistensi terhadap program yang tidak dipahami; partisipasi rendah
Service Gap	Alignment ekspektasi-manfaat	76% masyarakat harap manfaat ekonomi langsung; ekspektasi sebagai passive beneficiary vs realitas partisipasi aktif; pengalaman negatif program sebelumnya	Mismatch antara harapan-realitas; skeptisisme; partisipasi compliance-driven bukan conviction-driven

Analisis Komunikasi Publik: Saluran, Pesan, Frekuensi, dan Aktor

Karena efektivitas komunikasi publik bergantung pada konfigurasi saluran, isi pesan, frekuensi, dan aktor yang terlibat, temuan pada dimensi Communications Gap diuraikan lebih rinci pada bagian ini. Dari sisi saluran, komunikasi program di Desa Bioa Sengok masih didominasi oleh saluran searah berbiaya rendah, yaitu pengumuman pada papan desa dan grup WhatsApp internal perangkat desa, sementara saluran tatap muka yang dialogis (pertemuan RT/RW dan forum informal komunitas) yang justru paling dipreferensikan oleh 68% responden masyarakat belum dimanfaatkan secara sistematis. Dari sisi pesan, isi komunikasi cenderung menekankan target dan kewajiban administratif, bukan substansi manfaat, mekanisme keanggotaan, atau perbedaan koperasi desa dengan BUMDes; akibatnya hanya 18% responden yang pernah mendengar program merasa informasinya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari sisi frekuensi, sosialisasi bersifat sporadis dan terbatas pada forum formal yang hanya melibatkan kepala desa atau perwakilan perangkat, tanpa mekanisme pengulangan untuk menjangkau masyarakat luas. Dari sisi aktor, komunikasi belum melibatkan aktor jejaring informal tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan pengurus BUMDes yang memiliki kedekatan sosial dan kredibilitas di tingkat akar rumput.

Tabel 3. Klasifikasi Saluran Komunikasi, Jangkauan, dan Keterlibatan

Kategori saluran	Bentuk konkret di lapangan	Arah komunikasi	Bukti jangkauan/keterlibatan
Tatap muka	Forum sosialisasi formal; pertemuan RT/RW; forum	Cenderung satu arah (instruktif) pada forum	81% masyarakat tidak pernah diundang forum sosialisasi; 68% justru

	informal komunitas	formal	lebih memilih jalur RT/RW dan forum informal
Media sosial/digital	Grup WhatsApp internal perangkat desa	Internal, belum menjangkau publik	Belum ada strategi sistematis menjangkau masyarakat melalui platform digital meski penetrasi gawai cukup tinggi
Pengumuman desa	Papan pengumuman desa	Satu arah, pasif	Tidak efektif menjangkau warga yang kesibukan hariannya menyulitkan akses papan pengumuman

Pola di atas menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas komunikasi bukan semata persoalan ketersediaan saluran, melainkan ketidaksesuaian antara saluran yang dipakai pemerintah desa dan saluran yang dipercaya masyarakat, ditambah pesan yang berorientasi kepatuhan dan minimnya pelibatan aktor informal. Rangkuman indikator empiris untuk setiap dimensi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Bukti Empiris Kunci per Dimensi Kesenjangan

Dimensi	Indikator empiris kunci (angka dilaporkan)	Sumber data
Knowledge Gap	12% masyarakat memahami tujuan program dengan jelas; 65% tidak pernah mendengar program; 83% perangkat desa sudah mengetahui program	Survei (n=100)
Standards Gap	Hanya 23% perangkat menilai aturan tersosialisasi baik; 68% masih bingung dengan petunjuk teknis; tidak tersedia kode rekening Siskeudes	Survei; wawancara
Delivery Gap	Hanya 35% percaya kapasitas pemerintah desa; 52% ragu/tidak percaya; hanya 20% perangkat pernah dilatih koperasi	Survei; wawancara
Communications Gap	72% tidak pernah menerima informasi dari pemerintah desa; 81% tidak pernah diundang sosialisasi; 18% menilai bahasa mudah dipahami; 68% memilih jalur RT/RW	Survei; wawancara; FGD
Service Gap	76% mengharapkan manfaat ekonomi langsung; hanya 28% yakin manfaat sesuai kebutuhan; 64% bersikap wait-and-see	Survei; FGD

Hasil uji beda memperkuat gambaran ini: independent samples t-test menunjukkan perbedaan signifikan (p kurang dari 0,001) pada seluruh dimensi, dengan selisih terbesar pada Knowledge Gap (Cohen's $d = 2,34$) dan Communications Gap (Cohen's $d = 2,12$); analisis regresi berganda mengidentifikasi Communications Gap ($\beta = -0,48$; p kurang dari 0,001) dan Service Gap ($\beta = -0,31$; p kurang dari 0,01) sebagai prediktor terkuat kesediaan berpartisipasi. Temuan ini mendukung Proposisi 2.

Harmonisasi Regulasi dan Kelembagaan: Koperasi Desa, BUMDes, dan Regulasi Nasional

Agar rekomendasi bersifat realistis dan sesuai struktur pemerintahan desa, temuan perlu dikaitkan dengan kerangka regulasi dan kelembagaan yang berlaku. Program Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan beririsan dengan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara di tingkat desa telah berdiri BUMDes sebagai badan usaha milik desa. Potensi tumpang tindih muncul pada tiga titik: pertama, tumpang tindih fungsi ekonomi antara unit usaha koperasi desa dan unit usaha BUMDes yang sudah berjalan; kedua, tumpang tindih sumber daya dan perhatian aparat desa yang kapasitasnya terbatas; dan ketiga, ketidakjelasan dukungan anggaran karena belum tersedianya kode rekening koperasi desa dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sejalan dengan argumen Purwanto dan Sulistiyan (2017) tentang pentingnya sinergi kelembagaan ekonomi desa, solusi harmonisasi yang realistis mencakup: (1) memposisikan koperasi desa sebagai unit usaha di bawah payung BUMDes bukan institusi yang sepenuhnya terpisah untuk memanfaatkan infrastruktur dan kepercayaan yang sudah terbangun; (2) penerbitan petunjuk teknis dan kode rekening Siskeudes agar dukungan anggaran desa memiliki dasar prosedural yang jelas; dan (3) pembagian peran yang eksplisit antara koperasi desa dan BUMDes dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes) untuk mencegah kompetisi sumber daya. Perlu dicatat bahwa rincian instrumen hukum pelaksana (juklak/juknis) bersifat dinamis dan perlu diverifikasi pada sumber resmi terbaru sebelum dijadikan dasar implementasi.

Pembahasan temuan penelitian dalam konteks teori Expectancy Gap menunjukkan bahwa kelima dimensi kesenjangan yang teridentifikasi tidak berdiri sendiri melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan ineffectiveness komunikasi publik pemerintah desa. Knowledge Gap yang terjadi pada level pemerintah desa berdampak cascade pada Communications Gap karena aparat desa yang tidak memiliki pemahaman substantif tentang program mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan program dengan confidence dan persuasiveness kepada masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan (Parasuraman et al., 1991; Zeithaml et al., 1996) yang menekankan bahwa kesenjangan pemahaman antara manajemen dan konsumen tentang kebutuhan dan ekspektasi merupakan foundational gap yang mempengaruhi kesenjangan di dimensi lainnya. Standards Gap yang berupa ketidakjelasan regulasi dan mekanisme teknis memperburuk Knowledge Gap karena membuat pemerintah desa tidak hanya kekurangan pemahaman substantif tetapi juga tidak memiliki panduan operasional yang jelas untuk implementasi, menciptakan situasi double uncertainty yang sangat menghambat inisiatif dan komunikasi proaktif.

Aplikasi framework NATO dari (Hood & Margetts, 2007) dalam menganalisis instrumen komunikasi pemerintah desa mengungkapkan keterbatasan dalam seluruh dimensi instrumen. Dalam dimensi Nodality, meskipun pemerintah desa secara teoritis berada di posisi sentral dalam jaringan informasi desa, advantage posisional ini tidak dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah desa tidak aktif dalam mendiseminasi informasi program melalui multiple channels yang menjangkau berbagai segmen masyarakat. Dalam dimensi

Authority, otoritas legal pemerintah desa untuk mengkoordinasi dan memobilisasi masyarakat tidak ditranslasikan menjadi komunikasi yang persuasif dan engaging, melainkan cenderung instruktif dan compliance-oriented yang menciptakan partisipasi superficial. Dalam dimensi Treasure, keterbatasan sumber daya finansial desa untuk sosialisasi program yang intensif membatasi frekuensi dan kualitas komunikasi, dimana ketiadaan kode rekening Siskeudes untuk koperasi desa semakin memperparah constraint finansial ini. Dalam dimensi Organization, keterbatasan kapasitas organisasional pemerintah desa dalam hal SDM, sistem informasi, dan koordinasi internal membuat implementasi strategi komunikasi yang systematic dan comprehensive menjadi challenging. Analisis ini menunjukkan bahwa perbaikan efektivitas komunikasi memerlukan intervensi multi-dimensional yang tidak hanya fokus pada skill komunikasi individual aparatur tetapi juga penguatan dalam aspek organisasional dan sumber daya.

Sintesis temuan penelitian ini dengan literatur terdahulu mengkonfirmasi dan memperluas pemahaman tentang komunikasi kebijakan desa di Indonesia. Temuan tentang disparitas pemahaman antara perspektif administratif pemerintah desa dan perspektif praktis masyarakat resonan dengan studi (Nursetiawan et al., 2022) tentang program ekonomi desa, namun penelitian ini memperdalam pemahaman dengan mengidentifikasi bagaimana disparitas ini termanifestasi dalam multiple layers of gap dari Knowledge Gap hingga Service Gap. Temuan tentang pentingnya konteks sosial-budaya dan pengalaman historis dalam membentuk penerimaan program mengkonfirmasi argumen (Hasan, 2022), namun penelitian ini menunjukkan mekanisme spesifik bagaimana trust deficit dari pengalaman negatif program sebelumnya mentranslasi menjadi sikap skeptis dan wait-and-see yang menghambat partisipasi. Temuan tentang keterbatasan kapasitas aparatur desa sejalan dengan identifikasi (Polidu et al., 2025) dan (Lestari, 2022), tetapi penelitian ini menunjukkan bagaimana keterbatasan kapasitas ini tidak hanya mempengaruhi implementasi program tetapi juga fundamental dalam menghambat komunikasi efektif program sejak tahap awal.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada adaptasi dan aplikasi teori Expectancy Gap yang originally developed untuk konteks manajemen layanan ke domain komunikasi kebijakan publik di tingkat desa, menunjukkan utility teori ini untuk menganalisis kesenjangan dalam konteks yang berbeda dari original application-nya. Penelitian ini juga mengintegrasikan framework NATO dengan analisis kesenjangan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana keterbatasan dalam instrumen komunikasi pemerintah contribute to gaps yang teridentifikasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi fenomena cascading gaps dimana kesenjangan di satu dimensi berdampak pada dan memperkuat kesenjangan di dimensi lainnya, yang menekankan pentingnya intervensi sistemik daripada piecemeal dalam meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan. Dalam konteks praktis, penelitian ini memberikan evidenced-based insights tentang prioritas intervensi untuk meningkatkan komunikasi program pemberdayaan desa, dengan mengidentifikasi Communications Gap dan Service Gap sebagai predictor paling signifikan terhadap partisipasi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa fokus pada perbaikan kedua aspek ini akan memberikan impact paling besar terhadap peningkatan penerimaan program.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat yang tercermin dalam lima dimensi, yaitu *expectancy gap*, *knowledge gap*, *standards gap*, *delivery gap*, *communications gap*, dan *service gap*. Kesenjangan tersebut saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor regulasi, kapasitas sumber daya manusia, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik lokal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas komunikasi publik, munculnya sikap *wait-and-see*, partisipasi yang lebih bersifat kepatuhan daripada kesadaran, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan petunjuk teknis, pengembangan komunikasi publik yang partisipatif dan dialogis, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, sinkronisasi program dengan kelembagaan desa yang telah ada seperti BUMDes, serta adaptasi praktik terbaik koperasi yang berhasil sesuai konteks lokal. Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada koordinasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi dan masih berada pada tahap awal implementasi program, sehingga temuan lebih menggambarkan persepsi awal dibandingkan pengalaman implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan komparatif dan longitudinal untuk menguji dinamika kesenjangan serta efektivitas strategi komunikasi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target administratif, tetapi juga oleh kualitas komunikasi publik, pemahaman, rasa memiliki, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai fondasi keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, R. 2023. Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & ... 2016. Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian ...*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., Munson, S., & Glaisyer, T. 2010. Social Media Technology And Government Transparency. *Computer*, 43(11). <https://doi.org/10.1109/MC.2010.325>
- Braun, V., & Clarke, V. 2023. Toward Good Practice In Thematic Analysis: Avoiding Common Problems And Be(com)ing a Knowing Researcher. In *International Journal of Transgender Health* (Vol. 24, Number 1).
- Cornwall, A. 2008. Unpacking “Participation” Models, Meanings And Practices. *Community Development Journal*, 43(3). <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. 2006. New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Febriantini, K. T., Indriani, N. K., Kusuma, B. O., & Yuniari, N. K. Y. 2020. Sinergitas Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus : Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39295>
- Fetters, M. D., & Molina-Azorin, J. F. 2017. The Journal of Mixed Methods Research Starts a New Decade: The Mixed Methods Research Integration Trilogy and Its Dimensions. In *Journal of Mixed Methods Research* (Vol. 11, Number 3). <https://doi.org/10.1177/1558689817714066>
- Hasan, H. 2022. Persepsi Masyarakat terhadap Program Kampung Pendidikan Berbasis Nilai Religius Kearifan Lokal dalam Mengatasi Kemerosotan Moral Remaja. *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(1). <https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.2780>
- Hidayati, N., Mustofa, Z., & Basri, H. 2025. Memahami Dinamika Pendidikan Kesetaraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa : Pkbm Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember. *Srodja : Sroedji Journal Administration*, 2(1). <https://doi.org/10.70079/srodja.v2i1.51>
- Hood, C. C., & Margetts, H. Z. 2007. Looking Ahead: The Tools of Government in the Digital Age. In *The Tools of Government in the Digital Age*. https://doi.org/10.1007/978-1-137-06154-6_9
- Kushandajani, K. 2019. Social and Economic Empowerment For Village Women As A Strategy Of Village Development. In *The Indonesian Journal of Planning*, pdfs.semanticscholar.org/bc4f/d521fc1c695f842263df526c9597ae3674c9.pdf

- Lestariyono, W. 2022. Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa. *Jurnal Socio Politico*. <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/58>
- Mansuri, G., & Rao, V. 2013. Localizing Development: Does Participation Work? In *Washington, DC: The World Bank*. (Vol. 1).
- Nasution, R. D. 2016. Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development). In *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*.
- Nazaruddin, N., Aiyub, A., Chalirafi, C., Muryali, M., Ferizaldi, F., & Irwansyah, D. 2023. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Pengabdian Kreativitas (JPek)*, 2(2).
- Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & ... 2022. Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu*
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. 1988. Servqual Instrument. *Journal of Retailing*.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. 1991. Understanding Customer Expectations of Service Understanding Customer Expectations of Service Parasuraman , A .; Berry , Leonard L .; Zeithaml , Valarie A . *Sloan Management Review*, 32(3).
- Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 2025.
- Polidu, I., Prayitno Nento, H., & Batu, M. 2025. Aspek Hukum Dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1).
- Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community: New York: Simon und Schuster, 2001. ISBN. *Policy Analysis*, 20.
- Sawyer, K. 2017. Book review: Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action. *Social Media + Society*, 3(4).
<https://doi.org/10.1177/2056305117733669>
- Siahaan, E. P. 2024. Visualisasi Struktur Data Binary Heap Tree Berbasis Java Edison. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. 2022. Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2).
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. 2017. Decentralization and Rural Development in Indonesia. In *Decentralization and Rural Development in Indonesia*.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Udhiya, L., Ramdani, R., Program), Pemerintahan, S. I., Sosial, I., & Politik, I. 2024. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3).
- Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 1996. The Behavioral Consequences of Service Quality. *Journal of Marketing*, 60.
<https://doi.org/10.2307/1251929>